

Problematika Masyarakat Petani Rumput Laut

Jainudin Djou¹, Hayat², Agus Zainal Abidin³

Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang

Email: jainuindije@gmail.com¹, hayat@unisma.ac.id² agus.zainal@unisma.ac.id³

Abstract. *This study examines the problems faced by seaweed farmers and the role of the Blangmerang Village Government as a facilitator in addressing these challenges in Blangmerang Village, Pantar Barat District, Alor Regency, East Nusa Tenggara. Coastal community empowerment through seaweed cultivation has been promoted as a public policy strategy to reduce poverty and strengthen local economic resilience. However, farmers continue to encounter structural and technical constraints. This research applies a qualitative approach with a case study design to gain an in-depth understanding of social realities, experiences, and interactions within the community. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using an interactive model. The findings reveal multiple interconnected problems, including limited access to clean water, pest attacks (such as green and yellow algae, sea urchins, and marine worms), scarcity of seedlings, contamination from explosives, price fluctuations, infrastructure limitations, and conflicts over cultivation and drying areas. These issues affect productivity, product quality, and social cohesion among farmers. The Village Government has acted as a facilitator by providing production support, such as tarpaulins, main ropes, and drying nets, and by organizing deliberations to mitigate conflicts. While these efforts contribute to reducing operational costs and improving post-harvest quality, they have not fully resolved structural constraints, particularly market instability and inadequate infrastructure. The study concludes that successful seaweed sector management depends not only on natural and economic factors but also on the consistent implementation of good governance principles, including participation, transparency, accountability, and responsiveness. Strengthening the facilitative role of the village government is essential for achieving sustainable coastal community welfare.*

Keywords: *Seaweed Farmers, Coastal Community Empowerment, Good Governance.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji problematika yang dihadapi masyarakat petani rumput laut serta peran Pemerintah Desa Blangmerang sebagai fasilitator dalam menangani permasalahan tersebut di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya rumput laut merupakan bagian dari kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya petani masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman, dan interaksi masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan air bersih, serangan hama seperti lumut hijau dan kuning, bulu babi, serta cacing laut, kelangkaan bibit, pencemaran akibat bahan peledak, fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, serta konflik antar petani terkait lokasi penanaman dan penjemuran. Permasalahan tersebut berdampak pada produktivitas, kualitas hasil panen, dan hubungan sosial masyarakat. Pemerintah Desa Blangmerang telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan sarana produksi seperti terpal, tali induk, dan jaring penjemuran, serta pelaksanaan musyawarah untuk meredakan konflik. Meskipun bantuan tersebut membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan kualitas pasca panen, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural, terutama ketidakstabilan harga dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor rumput laut tidak hanya ditentukan oleh faktor alam dan ekonomi, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Petani Rumput Laut, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Good Governance.

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

*Jainudin Djou: Email: jainuindije@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang kurang mampu, sebagai bagian dari inisiatif pemerintah, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong ekonomi. Dalam konteks kebijakan publik (Adilah et al., 2022). Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada. Implementasi kebijakan pemberdayaan melalui budidaya rumput laut mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, Akbar & Tjenreng (2025) menekankan bahwa masyarakat harus diberikan akses, kesempatan, dan kapasitas agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri.

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan sehingga keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai.

Dalam dimensi *good governance*, Arafat (2023) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik memiliki banyak atribut, tata kelola yang baik bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel, tata kelola yang baik efektif dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dan adil, dan tata kelola yang baik mendorong supremasi hukum. Sementara itu, dalam perspektif pelayanan publik, menurut Azis et al., (2022) bahwa sebagaimana diketahui, pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakatnya atau publik. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat serta mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Darsana (2025) juga menegaskan bahwa produk pelayanan publik yang berupa barang dapat berlaku untuk banyak orang, sebaliknya jasa pelayanan yang diterima seseorang belum tentu sesuai dengan jasa pelayanan yang diterima atau diharapkan orang lain. Secara empiris, wilayah Baranusa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu kawasan dengan potensi kelautan terbesar. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (2022) menunjukkan bahwa produksi rumput laut di provinsi ini mencapai lebih dari 2,3 juta ton per tahun, menjadikannya kontributor utama ekspor nasional. Kabupaten Alor sendiri menghasilkan lebih dari 2.000 ton rumput laut kering per tahun, dengan lebih dari 1.500 pembudidaya tersebar di sembilan lokasi. Pulau Lapang, yang berada di wilayah administrasi Desa Blangmerang, menjadi pusat utama budidaya rumput laut dengan keterlibatan sekitar 370 pembudidaya dari delapan desa di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Dan Kecamatan Pantar Barat Laut.

Meskipun tidak berpenghuni tetap, pulau ini dimanfaatkan secara intensif karena kondisi perairannya yang mendukung. Namun, dalam praktiknya, pembudidayaan rumput laut di Pulau Lapang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di lokasi budidaya. Selain itu, serangan hama terhadap tanaman rumput laut masih sering terjadi dan berdampak pada penurunan produktivitas. Kelangkaan bibit juga menjadi kendala serius, terutama pada awal musim tanam, sehingga pembudidaya harus membeli dari sesama petani dengan harga yang fluktuatif. Beberapa lokasi perairan bahkan mengalami kontaminasi bahan peledak dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, termasuk area budidaya rumput laut. Permasalahan lain yang turut menghambat produktivitas adalah konflik antar petani terkait batas lahan budidaya dan kepemilikan lahan untuk penjemuran. Kondisi

ini diperburuk oleh fluktuasi harga rumput laut yang sering berubah dan tidak stabil, sehingga pendapatan masyarakat sulit diprediksi. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan infrastruktur dari Pemerintah Desa Blangmerang, seperti akses transportasi, fasilitas penjemuran, dan dukungan teknis, juga memperlambat pengembangan budidaya.

Padahal, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 3, negara berkewajiban menyediakan perlindungan, fasilitasi, dan dukungan modal bagi pembudidaya. Meskipun demikian, beberapa bentuk intervensi telah dilakukan untuk mendukung keberlanjutan budidaya. Pemerintah Desa Blangmerang, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Rasyid Mangkop, telah memberikan bantuan berupa tali induk, tali pengikat, tali iris, jaring horinet, dan terpal. Namun, bantuan tersebut masih belum mampu menjawab seluruh kebutuhan teknis dan infrastruktur para pembudidaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki wilayah dan berbagai masalah faktual yang dihadapi masyarakat, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut melalui penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau budaya melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif. Metode penelitian pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan persepektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu (Hayat, 2022). Penelitian ini lebih fokus kepada pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, serta pengalaman subjek penelitian dari pada menghitung variabel-variabel tertentu. Adapun strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*).

Strategi ini dipilih karena fokus penelitian secara khusus tertuju pada satu lokasi dan satu kelompok sosial tertentu, yaitu masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang. Alasan penggunaan studi kasus dalam penelitian ini adalah karena kondisi masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka statistik, melainkan membutuhkan pemahaman langsung melalui narasi, pengalaman, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dianggap paling tepat untuk mengungkap realitas sosial secara apa adanya (*natural setting*).

Kemudian penelitian ini menggunakan tipe deskripsi dimana tipe deskripsi ini dapat menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, objek, atau bahkan peristiwa berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian, khususnya dalam metode penelitian pendekatan kualitatif.

Lokasi seperti Desa Blangmerang (Pulau Lapang) memiliki karakteristik alam yang mendukung dari segi kualitas air, marus laut, ketersediaan ruang budidaya dan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dilaksanakan pada tanggal 25 maret 2025.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual. Instrumen penelitian juga berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel dan bahkan sesuai dengan tujuan penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri kemudian dibantu oleh alat penunjang seperti recorder dan camera sebagai alat untuk merekam dan mengambil gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Air Bersih, Serangan Hama Pada Rumput Laut Dan Kelangkaan Bibit Rumput Laut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Ere, salah satu informan masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang, diperoleh keterangan bahwa keterbatasan air bersih merupakan permasalahan utama yang sangat memengaruhi aktivitas masyarakat dalam melakukan budidaya rumput laut.

Menurut Ida, selama melakukan kegiatan budidaya di Pulau Lapang, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk minum maupun mandi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sumber air tawar di pulau tersebut, sehingga masyarakat harus membawa sendiri air dari rumah masing-masing di Desa Blangmerang menggunakan jeriken atau drum. *“Masalah yang sering kami hadapi itu air minum dan air untuk mandi. Di pulau tidak ada air, jadi kami bawa dari rumah, dan kalau habis ya harus pulang lagi,”*

Dari hasil wawancara bersama Ida Ere, disebutkan bahwa keterbatasan air bersih merupakan hambatan paling mendasar dalam pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut di Desa Blangmerang. Masalah ini tidak hanya mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan usaha budidaya itu sendiri. Oleh karena itu, penyediaan akses air bersih menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

Selain wawancara bersama Ida, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sirajudin Laka, sebagai informan kedua hasil wawancara dengan Sirajudin, salah satu petani rumput laut di Desa Blangmerang, menunjukkan bahwa persoalan air bersih bukan hanya soal kekurangan, tetapi juga menyangkut ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat pesisir yang beraktivitas di Pulau Lapang. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat sarana penyedia air bersih permanen di lokasi budidaya, sehingga masyarakat sepenuhnya bergantung pada pasokan air yang mereka bawa dari daratan utama. *“Air di pulau itu tidak ada sama sekali, jadi semua kami bawa sendiri dari rumah. Kadang ada yang simpan di drum besar, tapi kalau lama di sana ya tetap kurang,”*

Menurut Sirajudin, meskipun sebagian masyarakat berusaha meniasati keadaan dengan menyimpan air dalam jeriken dan drum, cara tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan harian, terutama saat musim panas atau ketika aktivitas budidaya meningkat. Ia menambahkan bahwa tidak adanya fasilitas penampungan air hujan atau tangki besar di lokasi budidaya membuat masyarakat kesulitan menjaga stok air dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa menetap lama di pulau dan harus sering kembali ke daratan. Sirajudin menilai bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah desa maupun instansi terkait. Ia berharap adanya pembangunan sarana air bersih sederhana, seperti tangki penampungan atau instalasi penampung air hujan, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan efisien. *“Kalau bisa ada tempat tampung air di sana, kami tidak perlu bolak-balik ke darat. Jadi bisa fokus kerja di laut,”*

Serangan hama pada rumput laut menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir, termasuk di Desa Blangmerang. Hama tersebut dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut, menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga berdampak pada pendapatan para pembudidaya. Kondisi ini menuntut adanya perhatian dan peran serta dari berbagai pihak, khususnya pemerintah desa, dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Blangmerang, peneliti memperoleh informasi bahwa salah satu permasalahan

utama yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan budidaya rumput laut adalah serangan hama laut yang menyebabkan penurunan kualitas dan produktivitas tanaman.

Kepala desa menjelaskan bahwa serangan hama seperti lumut, bulu babi, dan cacing laut sering muncul pada musim tertentu, terutama ketika kondisi air laut mulai tidak stabil atau suhu air meningkat. *“Serangan hama seperti lumut dan cacing laut sering kali membuat rumput laut tidak tumbuh sempurna. Kalau dibiarkan, hasil panen jadi menurun,”*

Menurut beliau, hama-hama tersebut menempel pada tali dan permukaan rumput laut sehingga menghambat proses pertumbuhan dan menurunkan kualitas panen. Kepala desa menambahkan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembagian sarana budidaya, seperti jaring dan terpal, agar masyarakat lebih siap menghadapi serangan hama. Namun demikian, beliau mengakui bahwa penanganan hama laut masih menjadi tantangan tersendiri, karena sifatnya alami dan sulit dikendalikan tanpa dukungan teknologi dan tenaga ahli. Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa (Rasyid Mangkop), disebutkan bahwa, serangan hama pada rumput laut merupakan permasalahan ekologis dan teknis yang memerlukan penanganan terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah desa telah melakukan langkah awal berupa penyuluhan dan bantuan sarana, namun upaya lanjutan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar keberlangsungan budidaya rumput laut dapat terus terjaga.

Setelah memperoleh informasi dari Kepala Desa Blangmerang mengenai serangan hama pada rumput laut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurjanah Djou, salah seorang pembudidaya rumput laut. Menurut Nurjanah Djou, hama yang sering menyerang rumput laut antara lain sejenis lumut hijau, terutama muncul pada musim tertentu atau saat kondisi laut kurang stabil. Serangan hama ini menyebabkan pertumbuhan rumput laut terhambat dan kualitas panen menurun, sehingga berdampak pada pendapatan keluarga pembudidaya. *“Kadang hama ini muncul tiba-tiba dan membuat rumput laut tidak tumbuh sempurna. Jika tidak segera ditangani, hasil panen pasti menurun,”*.

Dari hasil wawancara dengan Nurjanah Djou, disebutkan bahwa serangan hama lumut hijau merupakan kendala serius dalam budidaya rumput laut di Desa Blangmerang. Dampaknya terlihat pada pertumbuhan tanaman yang terganggu dan penurunan hasil panen, sehingga memengaruhi pendapatan pembudidaya. Meskipun masyarakat telah berupaya mengatasi hama secara mandiri, dukungan dan bimbingan dari pihak terkait tetap diperlukan agar pengendalian hama lebih efektif dan keberlangsungan budidaya rumput laut dapat terjaga.

Setelah melakukan wawancara dengan Nurjanah Djou, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ida Ere, salah seorang pembudidaya rumput laut di Desa Blangmerang. Menurut Ida Ere, hama yang paling sering menyerang rumput laut adalah lumut hijau dan lumut kuning, yang biasanya muncul saat perubahan suhu laut atau arus air tidak stabil. Serangan hama ini menyebabkan pertumbuhan rumput laut terhambat dan kualitas panen menurun, sehingga berdampak pada pendapatan keluarga pembudidaya. *“Kadang lumut hijau dan lumut kuning ini muncul secara tiba-tiba, dan membuat rumput laut menjadi rusak atau sulit berkembang. Kalau tidak segera dibersihkan, hasil panen pasti berkurang,”*.

Ida Ere menyampaikan bahwa serangan lumut hijau dan lumut kuning sering menyebabkan rumput laut menjadi lemah dan pertumbuhannya terhambat. Meski masyarakat berupaya membersihkan lumut secara rutin, serangan yang terus-menerus tetap berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Ia menekankan bahwa dukungan dari pihak terkait, misalnya melalui pelatihan atau bimbingan teknis, sangat diperlukan agar tingkat kerusakan bisa ditekan dan hasil budidaya lebih optimal. Dari wawancara bersama Ida Ere, disebutkan

bahwa lumut hijau dan lumut kuning merupakan hama yang memberikan tantangan nyata bagi pembudidaya rumput laut. Penanganan yang efektif memerlukan kerja sama antara masyarakat dan pihak terkait untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus memastikan keberlanjutan budidaya di Desa Blangmerang.

Kelangkaan bibit rumput laut menjadi salah satu permasalahan utama bagi masyarakat pembudidaya di Desa Blangmerang. Bibit yang tersedia di wilayah tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan tanam, terutama pada musim tertentu ketika permintaan meningkat. Kondisi ini sering menyebabkan petani harus menunda proses penanaman karena tidak tersedia bibit dalam jumlah yang memadai. Selain terbatasnya ketersediaan, kualitas bibit juga sering tidak stabil. Pada periode tertentu, petani hanya mendapatkan bibit dengan kondisi kurang baik sehingga pertumbuhan menjadi lambat dan produksi tidak optimal.

Situasi ini berdampak langsung pada keberlanjutan usaha budidaya. Ketika bibit sulit diperoleh, sebagian petani harus mencari bibit dari daerah lain yang jaraknya lebih jauh, dan hal tersebut memerlukan biaya tambahan. Tidak semua petani mampu melakukannya sehingga produksi rumput laut mengalami penurunan. Kelangkaan bibit ini menunjukkan bahwa pasokan bahan tanam masih belum terjamin, sehingga diperlukan adanya dukungan fasilitas atau distribusi bibit yang lebih teratur agar kegiatan budidaya dapat berjalan dengan lancar. Wawancara mengenai ketersediaan bibit rumput laut dilakukan dengan salah satu petani setempat bernama Frengki. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kelangkaan bibit masih menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama ketika memasuki musim tanam.

Bibit lokal sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga beberapa petani harus menunda kegiatan budidaya, kemudian ada yang membeli bibitnya di pulau yang lain. “Kalau sudah musim tanam, bibit cepat habis. Jadi kami kadang menunggu dulu sampai ada yang jual. Apabila stok bibit benar-benar kosong, masyarakat terpaksa mencari bibit di tempat lain. Salah satu lokasi yang biasa dituju adalah Pulau Kangge. Namun upaya ini membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Seperti yang disampaikan Frengki, “Kalau di sini kosong, kami pergi beli ke Pulau Kangge. Tapi itu pakai perahu dan butuh uang lebih,”.

Bibit yang didatangkan ini nantinya akan dipakai untuk diikat ke tali induk kemudian akan di lepaskan ditempat yang sudah tersedia oleh petani. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan bibit rumput laut di wilayah penelitian masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Masyarakat harus membeli bibit dan mengangkutnya melalui jalur laut menggunakan perahu motor. Proses ini memerlukan biaya tambahan, namun tetap dilakukan agar kegiatan budidaya rumput laut dapat terus berjalan dan produksi tetap terjaga.

Terkontaminasi Dengan Bahan-Bahan Peledak, fluktuasi Harga Rumput Laut Dan Kurangnya Sarana Infrastruktur Dari Pemerintah Desa Blangmerang

Pengolahan rumput laut di kawasan pesisir tidak hanya menghadapi gangguan hama, tetapi juga resiko pencemaran lingkungan. Salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah adanya rumput laut yang terkontaminasi bahan-bahan peledak yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurjanah Djou, rumput laut masyarakat mengalami kerusakan akibat kontaminasi bahan-bahan peledak yang digunakan oleh oknum nelayan saat mencari ikan. Ledakan yang terjadi di sekitar area budidaya menyebabkan serpihan bahan kimia dan residu ledakan menyebar di perairan, lalu menempel pada tanaman rumput laut. Hal ini membuat rumput laut menjadi kotor, berubah warna, dan tidak layak dijual. “*Kalau ada yang pakai bom, rumput laut kami itu banyak rusak, warnanya berubah dan tidak bisa dijual lagi.*”. Berdasarkan hasil wawancara bersama Nurjanah Djou, disebutkan bahwa penggunaan bahan peledak secara langsung menurunkan kualitas hasil panen dan menyebabkan kerugian bagi petani.

Selain melakukan wawancara bersama Nurjanah Djou, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sahrul, beliau menjelaskan bahwa rumput laut yang terkontaminasi dengan bahan peledak akan menyebabkan kualitas rumput laut menurun sehingga menyebabkan harga jual rumput laut juga semakin kurang. Tidak hanya itu proses-proses pembersihan rumput laut yang terkontaminasi juga membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. *“Biasanya kami harus bersihkan satu-satu, buang yang kotor. Itu makan waktu lama, dan kadang kami rugi karena banyak yang dibuang.”*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sahrul, disebutkan bahwa rumput laut yang kontaminasi dengan peledak membuat proses produksi menjadi lebih berat dan menambah biaya kerja petani.

Fluktuasi harga rumput laut adalah persoalan yang cukup sering dirasakan oleh masyarakat pesisir, khususnya para petani sebagai pelaku utama budidaya. Harga jual yang tidak stabil membuat pendapatan petani menjadi tidak menentu, bahkan pada periode tertentu terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Nurjanah Djou, beliau mengatakan bahwa *“Harga rumput laut itu tidak pernah tetap. Kadang naik, tapi sering juga turun tiba-tiba”*.

Kalau musim panen bersamaan, harga biasanya jatuh karena pengepul bilang pasokan banyak. Kami petani mau tidak mau tetap menjual, karena tidak ada tempat penyimpanan lama.”. Berdasarkan hasil wawancara dari Nurjanah Djou, disebutkan bahwa fluktuasi harga rumput laut dipengaruhi kondisi pasar dan musim panen. Petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan, sehingga tetap menjual hasil panen walaupun harga rendah. Situasi ini menyebabkan pendapatan petani sering tidak stabil dan bergantung pada kondisi pasar.

Rumput laut yang sudah dimasukkan ke dalam karung besar ditimbang menggunakan timbangan manual yang digantung pada sebatang kayu dan kadang ditaruh dipundak Masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pasca panen untuk menentukan berat dan nilai jual rumput laut sebelum diserahkan kepada pengepul atau koperasi. Penimbangan dilakukan di area pemukiman dekat tempat pengolahan, sehingga memudahkan petani dalam menghitung total hasil panen mereka.

Kurangnya sarana dan infrastruktur pendukung menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh masyarakat Desa Blangmerang, khususnya bagi petani rumput laut yang bergantung pada fasilitas produksi dan akses transportasi. Beberapa petani juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas umum yang dapat menunjang keberlanjutan usaha, sehingga aktivitas produksi lebih banyak bergantung pada alat dan cara tradisional. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Blangmerang (Rasyid Mangkop), beliau mengungkapkan bahwa.

“Desa sudah membangun dua toilet umum sebagai fasilitas sanitasi. Namun fasilitas tersebut belum berfungsi maksimal karena belum tersedia sumber air tetap. Kami sedang mengajukan bantuan ke pemerintah kabupaten agar toilet tersebut dapat digunakan sepenuhnya dan masyarakat tidak lagi ke pantai.”

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Blangmerang (Rasyid Mangkop), disebutkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pembangunan fasilitas, namun masih terdapat kendala teknis berupa ketersediaan air dan pemeliharaan. Pemerintah desa berperan sebagai pengusul dan fasilitator, sementara perbaikan lanjutan membutuhkan dukungan dari pemerintah tingkat di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sanitasi masih dalam proses penyelesaian.

Selain melakukan wawancara dengan kepala Desa Blangmerang (Rasyid Mangkop), peneliti juga melakukan wawancara bersama Ida Ere, beliau mengatakan bahwa “Toilet sebenarnya ada, tapi sudah banyak yang rusak. atapnya dan lantainya juga kotor, jadi kami tidak nyaman pakai. Kadang kalau terpaksa, kami ambil air laut untuk siram, tapi itu juga tidak efektif. Makanya kebanyakan orang tetap pergi ke pantai.”.

Dari hasil wawancara Ida Ere, disebutkan bahwa persoalan sanitasi bukan hanya soal ketersediaan toilet, tetapi juga kondisi fisik bangunan yang tidak layak pakai. Kerusakan pada fasilitas membuat masyarakat enggan memanfaatkannya, sehingga aktivitas buang air besar masih dilakukan di pantai. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana saja tidak cukup tanpa pemeliharaan yang baik.. Selain melakukan wawancara bersama Kepala Desa (Rasyid Mangkop) dan Ida Ere, peneliti juga melakukan wawancara bersama Sirajudin dan beliau mengatakan bahwa “Pemerintah memang pernah bangun toilet, tapi setahu saya toiletnya tidak ada air dan tidak terawat.

2. Pentingnya Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Rumput Laut

Peran pemerintah Desa Blangmerang sebagai Fasilitator sangat penting dalam mendukung kegiatan budidaya rumput laut yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Sebagai pihak yang menjalankan kebijakan di tingkat desa, pemerintah berusaha membantu petani melalui penyediaan sarana pendukung, penyampaian informasi, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena mayoritas warga menggantungkan pendapatan dari rumput laut, sehingga masalah seperti infrastruktur, harga jual, dan fasilitas umum sangat berpengaruh terhadap hasil dan penghasilan warga. Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya petani rumput laut.

Pemerintah Desa Blangmerang terus berupaya mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat. Budidaya rumput laut memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara optimal, baik pada tahap produksi maupun pascapanen, sehingga diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah desa terhadap keberlanjutan usaha budidaya rumput laut, disalurkan bantuan berupa sarana pendukung yang dibutuhkan oleh petani. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hasil panen, efisiensi kerja, serta nilai jual rumput laut. Adapun jenis bantuan yang diberikan meliputi tarpal, tali induk, dan jaring, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan budidaya dan pascapanen rumput laut.

Pemberian tarpal kepada masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang bertujuan untuk menunjang proses pasca panen, khususnya pada tahap penjemuran dan pengeringan rumput laut. Dengan adanya tarpal, petani dapat menjemur hasil panen secara lebih bersih, tertata, dan terlindung dari kontaminasi tanah, pasir, maupun kotoran lain yang dapat menurunkan kualitas rumput laut. Selain itu, penggunaan tarpal juga membantu mempercepat proses pengeringan karena rumput laut tidak langsung bersentuhan dengan permukaan tanah yang lembap. Manfaat dari pemberian tarpal ini adalah meningkatnya kualitas rumput laut kering yang dihasilkan oleh petani. Rumput laut yang bersih dan kering secara merata memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Di samping itu, tarpal juga membantu petani mengurangi resiko kerusakan hasil panen akibat cuaca atau lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut secara berkelanjutan.

Pembahasan

Permasalahan yang dihadapi masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang bersumber dari kondisi geografis, ekologis, dan kelembagaan. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari belum optimalnya formulasi dan implementasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat pesisir. Sebagaimana dijelaskan oleh Arafat (2023), kebijakan publik merupakan instrumen negara dalam merespons persoalan masyarakat melalui keputusan dan tindakan yang terarah. Namun, ketika kebijakan belum mampu menjawab kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih dan infrastruktur produksi, maka kesenjangan antara potensi dan realitas sosial akan terus terjadi.

Keterbatasan air bersih yang dialami petani bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dwiyanto (2008) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif. Dalam konteks ini, belum tersedianya sistem penyediaan air bersih permanen menunjukkan bahwa aspek efektivitas dan pemerataan layanan belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan dalam dokumen UNDP (1999) menekankan pentingnya akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Artinya, penyediaan air bersih seharusnya menjadi prioritas kebijakan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya masih dibatasi oleh faktor struktural. Risman & Tawulo (2019) menekankan bahwa pemberdayaan harus memberikan akses dan kontrol kepada masyarakat atas sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan sarana produksi, upaya pemberdayaan menjadi tidak optimal. Sejalan dengan itu, Darsana (2025) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak hanya berbentuk bantuan material, tetapi juga penguatan kapasitas dan sistem pendukung yang berkelanjutan.

Pada aspek ekologis, serangan hama seperti lumut hijau, lumut kuning, bulu babi, dan cacing laut menunjukkan bahwa budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan. Penelitian Asni (2015) menunjukkan bahwa faktor musim dan kondisi perairan berpengaruh signifikan terhadap produksi rumput laut. Ketidakstabilan arus dan suhu air dapat memicu pertumbuhan organisme pengganggu yang menurunkan kualitas hasil panen. Hal ini mempertegas bahwa produktivitas petani tidak semata-mata ditentukan oleh keterampilan individu, tetapi juga oleh daya dukung ekosistem laut.

Kelangkaan bibit rumput laut yang terjadi secara periodik juga menunjukkan lemahnya sistem distribusi dan manajemen produksi. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, Hidayat dan Safitri (2019) menegaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan memerlukan dukungan sistem produksi yang terintegrasi, termasuk ketersediaan bahan baku dan rantai distribusi yang stabil. Ketika pasokan bibit tidak terjamin, maka siklus produksi menjadi terganggu dan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Permasalahan pencemaran akibat penggunaan bahan peledak mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan. Hayat (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus disertai mekanisme evaluasi dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi. Praktik penangkapan ikan ilegal tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu keberlanjutan usaha budidaya rumput laut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Dari sisi sosial, konflik antar petani terkait lokasi budidaya dan penjemuran menunjukkan belum optimalnya tata kelola lokal. Margayaningsih (2018) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Tanpa aturan yang jelas dan disepakati bersama, potensi perselisihan akan terus muncul dan menghambat produktivitas.

Permasalahan ekonomi berupa fluktuasi harga memperlihatkan lemahnya posisi tawar petani dalam struktur pasar. Temuan Firman (2019) menunjukkan bahwa pendapatan petani rumput laut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pasar dan biaya produksi. Ketika harga tidak stabil dan petani bergantung pada pengepul, maka risiko ekonomi semakin tinggi. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi agar petani memiliki daya tawar yang lebih kuat.

Dalam konteks tersebut, peran Pemerintah Desa Blangmerang sebagai fasilitator menjadi sangat penting. Hakim (2018). menegaskan bahwa pemerintah pada hakikatnya hadir untuk melayani kepentingan masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan warga berkembang secara mandiri. Sementara itu, menurut Windasai et al., (2021) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Artinya, efektivitas peran pemerintah desa tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya dan koordinasi kelembagaan.

Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di Desa Blangmerang tidak dapat dipahami sebagai persoalan parsial, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan kebijakan terpadu. Penguatan peran fasilitatif pemerintah desa melalui perencanaan partisipatif, penyediaan infrastruktur dasar, pengawasan lingkungan, serta pembentukan kelembagaan ekonomi kolektif menjadi kunci untuk mewujudkan keberlanjutan sosial, ekologis, dan ekonomi masyarakat petani rumput laut.

KESIMPULAN

Masyarakat petani rumput laut di Desa Blangmerang menghadapi berbagai permasalahan dalam kegiatan budidaya rumput laut di Pulau Lapang. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan air bersih yang sangat memengaruhi kebutuhan dasar dan kelancaran aktivitas budidaya, serangan hama yang menurunkan kualitas dan hasil panen rumput laut, kelangkaan bibit terutama pada awal musim tanam, serta adanya kontaminasi bahan peledak yang berdampak pada kondisi lingkungan perairan. Selain itu, konflik antar petani terkait lokasi penanaman, fluktuasi harga rumput laut yang tidak stabil, serta keterbatasan sarana dan infrastruktur pendukung turut memengaruhi tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut.

Peran pemerintah Desa Blangmerang sebagai fasilitator dalam menangani permasalahan masyarakat petani rumput laut telah diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana produksi seperti terpal, tali induk, dan jaring. Bantuan tersebut memberikan kontribusi positif dalam menunjang proses budidaya, khususnya pada tahap pemeliharaan dan penjemuran rumput laut. Namun demikian, peran fasilitasi pemerintah desa masih belum sepenuhnya optimal karena belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama terkait penyediaan air bersih, pengendalian hama, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta stabilitas harga rumput laut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah desa melalui perencanaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan partisipatif agar upaya pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

REFERENSI

- Adilah, N., Cikusin, Y., & Hayat. (2022). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 33-43.
- Akbar, R. F. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Manajemen pelayanan publik. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 291-304.
- Arafat. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Asni, A. (2015). Analisis produksi rumput laut (*Kappaphycus alvarezii*) berdasarkan musim dan jarak lokasi budidaya di perairan Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Akuatika Indonesia*, 6(2), 140-153.
- Azis, F., Risfaisal, & Rosa, I. (2022). Social capital of coastal communities (Study of social welfare of seaweed farmers in Jenepono Regency). *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 24-36.
- Darsana, I. M. (2025). *Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik*. UNESCO.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Firman, H. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani rumput laut di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 14-22. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.335>
- Hakim, A. (2018). Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani mandiri kelapa sawit di Kecamatan Segah. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 3(2), 31-38. <https://doi.org/10.54526/jes.v3i2.8>
- Hayat. (2018). *Kebijakan publik: Evaluasi reformasi dan formulasi*. Intrans Publishing.
- Hayat., Turohman, S.H., & Cikusin, Y. (2018). Strategi pembangunan sumber daya manusia berbasis pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(2), 147-164.
- Hayat. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press
- Hidayat, A., & Safitri, P. (2019). Pengembangan komoditas rumput laut Nusa Tenggara Barat dengan model hexagon untuk pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 45-56. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i1.7359>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Risman, J., & Tawulo, M. A. (2019). Strategi petani rumput laut dalam mengatasi problematika sosial ekonomi. *Jurnal Neo Societal*, 4(3), 896-906.
- Windasai., Said, M.S. & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(3), 793-804.